

Unofficial translation

# Group Anti Corruption Guideline/ *Pedoman Group tentang Anti Korupsi*

Scope : All companies of the HeidelbergCement Group  
*Ruang Lingkup* : *Seluruh Perusahaan dalam HeidelbergCement Group*  
Author : Group Compliance  
*Diterbitkan oleh*  
Issued: February 2021  
*Tanggal terbit* :  
Version : 4.1  
*Versi*

## Daftar Isi/*Table of Content*

Pendahuluan/ <i>Introduction</i> .....	3
1. Prinsip-prinsip Hukum..... <i>Legal Principles</i>	4
2. Pemberian dari pemasok, penyedia layanan atau mitra bisnis lainnya..... <i>Gift from suppliers, service provides or other business partners</i>	4
3. Pemberian kepada karyawan pelanggan atau mitra bisnis lainnya..... <i>Gift to employees of customers or other business partners</i>	6
4. Pemberian kepada pejabat pemerintah..... <i>Gifts to public officials</i>	6
5. Benturan Kepentingan..... <i>Conflict of interest</i>	7
6. Kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan..... <i>Corporate Citizenship activities</i>	8
7. Menunjuk agen dan penasehat..... <i>Appointing agents and advisors</i>	9
8. Merger dan akuisisi..... <i>Mergers and acquisitions</i>	10
9. Pelatihan..... <i>Training</i>	11
10. Rotasi Personil, integritas dua orang, dokumentasi..... <i>Personnel rotation, two-person integrity, documentation</i>	11
11. Kepatuhan, <i>hotline SpeakUp</i> , pertanyaan..... <i>Compliance, SpeakUp hotline, questions</i>	12
12. Kontak dan informasi lebih lanjut..... <i>Contact and further information</i>	12

## Introduction

One of the goals of the HeidelbergCement Group's compliance programme is to prevent corrupt behaviour by Group companies and employees. Sections 2.3-2.5 of the Code of Business Conduct ("Anticorruption", "Gifts, hospitality and benefits", "Conflicts of interest") set forth general anticorruption principles. This Guideline is part of the Group compliance programme and gives guidance to employees by providing additional detail on this important topic. This Guideline was first adopted by the Managing Board and came into effect on 1 October 2007. This version replaces the previous one and takes effect following its publication on the HeidelbergCement Intranet in **February 2021**. The Guideline and the policy it contains of preventing corrupt behaviour apply to all companies of the HeidelbergCement Group<sup>1</sup>.

This Guideline speaks not only to corruption punishable by relevant penal laws, but addresses and prohibits unethical behaviour, even if this conduct is not a punishable criminal offence. This approach is based on the principle that it is important to avoid even the suggestion that a business or governmental decision might have been influenced by the acceptance or granting of an advantage, be it personal or for any third party.

Special compliance guidelines (e.g. purchasing, tax, treasury, etc.) might specify additional requirements.

This Guideline is addressed to all employees<sup>2</sup> who have responsibilities in which corruption could occur, particularly

- employees involved in procurement, i.e. purchasing employees as well as engineers who are in charge of determining the types of goods and services to be purchased and their specifications;
- employees of specialist departments that use external service providers such as attorneys, accountants, auditors, consultants, etc.;
- employees of departments that are responsible for obtaining governmental permits of all kinds and other approvals;
- sales employees;

## Pendahuluan

Salah satu tujuan pencapaian program kepatuhan HeidelbergCement Group adalah untuk mencegah perilaku korupsi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan karyawan Group. **Bagian 2.3-2.5** dari Pedoman tentang Perilaku Bisnis ("Anti Korupsi", "Hadiah, keramahtamahan, dan tunjangan", "Benturan Kepentingan") menetapkan prinsip-prinsip umum anti korupsi. Pedoman ini merupakan bagian dari program kepatuhan Group dan memberikan pedoman kepada karyawan dengan memberikan penjelasan tambahan mengenai topik penting ini. Pedoman ini pertama kali diadopsi oleh Dewan Pengurus dan berlaku sejak 1 Oktober 2007. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dan berlaku sejak pertama kali dipublikasikan di intranet HeidelbergCement pada **Februari 2021**. Pedoman ini dan kebijakan yang terkandung di dalamnya adalah tentang pencegahan perilaku korupsi yang berlaku untuk semua perusahaan HeidelbergCement Group<sup>3</sup>.

Pedoman ini tidak hanya membahas korupsi yang dapat dikenakan hukuman pidana terkait, namun juga membahas dan melarang perilaku yang tidak etis, meskipun perilaku tersebut bukan merupakan tindak pidana. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa penting untuk menghindari anggapan sekalipun bahwa bisnis atau keputusan pemerintah telah dipengaruhi oleh penerimaan atau pemberian suatu manfaat baik itu pribadi atau untuk pihak ketiga.

Pedoman kepatuhan khusus (contoh: pengadaan, pajak, treasury, dan lain-lain) akan memerlukan persyaratan-persyaratan tambahan.

Pedoman ini ditujukan kepada seluruh karyawan<sup>3</sup> yang memiliki tanggung jawab di mana korupsi dapat terjadi, terutama

- Karyawan yang terlibat dalam pengadaan, yaitu karyawan pengadaan serta para insinyur yang bertanggung jawab untuk menentukan jenis barang dan jasa yang akan dibeli dan spesifikasinya;
- Karyawan dari departemen spesialis yang menggunakan penyedia layanan pihak ketiga seperti pengacara, akuntan, auditor, konsultan, dll;
- Karyawan dari departemen yang bertanggung jawab untuk mendapatkan izin pemerintah apapun jenisnya dan persetujuan lainnya;
- Karyawan bagian penjualan;

<ul style="list-style-type: none"> <li>- employees involved in corporate acquisitions; and</li> <li>- employees involved in Corporate Citizenship activities (sponsorships, donations, etc.) that accompany HC CAPEX projects.</li> </ul> <p>Failure to comply with the provisions of this Guideline may subject an employee to disciplinary actions including termination of employment.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Karyawan yang terlibat dalam akuisisi perusahaan, dan</i></li> <li>- <i>Karyawan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan (sponsor, donasi, dll) yang menyertai proyek-proyek HC CAPEX.</i></li> </ul> <p><i>Kegagalan karyawan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pedoman ini dapat dikenakan tindakan disiplin termasuk pemutusan hubungan kerja.</i></p>
<p><b>1 Legal principles</b></p> <p>1.1 Corruption is a punishable offence in most countries in which the HeidelbergCement Group operates. However, the activities constituting corruption which are punishable by law often vary among countries. For example, in certain countries only the bribery of public officials is punished and not, as in other countries, bribery between business partners as well as the bribery of public officials.</p> <p>1.2 Criminal bribery in business dealings may be committed actively or passively. Both, the person or company, offering the bribe and the person receiving it may be punished. Bribery is defined as the direct or indirect offering, promising, authorising or granting, or the requesting or accepting, of a personal advantage of any nature in the expectation of a specific behaviour (positive act or omission, fair or unfair) in favour of the person giving the bribe, the company on whose behalf this person is acting, or a third party.</p> <p>1.3 Bribery is a criminal offence and several jurisdictions provide for extraterritorial applicability of their national laws. Thus, it does not matter if an offence is committed within the country whose laws are being applied to an individual based on his/her nationality or outside that country. One</p>	<p><b>1. Prinsip-prinsip Hukum</b></p> <p>1.1. <i>Korupsi adalah pelanggaran yang dapat dikenakan hukum di sebagian besar negara dimana Grup HeidelbergCement beroperasi. Namun, kegiatan-kegiatan yang merupakan tindak pidana korupsi dan dikenakan hukuman oleh undang-undang sering kali berbeda di setiap negara. Sebagai contoh, di negara-negara tertentu hanya penyuapan pejabat pemerintah yang di hukum tidak seperti di negara-negara lainnya, penyuapan antar mitra bisnis maupun penyuapan terhadap pejabat pemerintah.</i></p> <p>1.2. <i>Tindak pidana penyuapan dalam transaksi bisnis dapat dilakukan dengan cara aktif maupun pasif. Baik orang atau perusahaan yang menawarkan suap dan orang yang menerima dapat dihukum. Penyuapan didefinisikan sebagai secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, menjanjikan, mengesahkan atau memberikan ijin, atau meminta atau menerima, untuk keuntungan pribadi dalam bentuk apapun dengan harapan perilaku tertentu (tindakan positif atau kelalaian, adil atau tidak adil) untuk kepentingan orang yang memberikan suap, perusahaan atas nama siapa orang tersebut bertindak, atau pihak ketiga.</i></p> <p>1.3. <i>Suap adalah tindak pidana dan beberapa yurisdiksi menetapkan penerapan ekstrateritorial terhadap hukum nasional mereka. Jadi, bukan masalah apabila pelanggaran dilakukan di negara yang hukumnya sedang diterapkan pada individu berdasarkan kebangsaan atau di luar negara</i></p>

<sup>1</sup> HeidelbergCement AG and all companies which are directly or indirectly controlled by HeidelbergCement AG; for joint entities the definition and the rules of the Group Compliance Policy apply as well for this Guideline

<sup>2</sup> Throughout this Guideline the term "employees" is used for all persons with a professional function in the company (incl. directors, managers, officers, temporary staff, etc.)

<sup>3</sup> *Dalam Pedoman ini istilah "karyawan" digunakan untuk semua orang dengan fungsi profesional di perusahaan (termasuk direktur, manajer, pejabat, staf sementara, dll.)*

<p>offence may be subject to several jurisdictions. Punishment of individuals can include fines, prison sentences of up to several years, privation of certain rights, and confiscation of property; companies on whose behalf a person is offering, promising, authorising or granting bribes can be subject to criminal or administrative fines, confiscation of illegal benefits or may face administrative consequences.</p> <p>1.4 If personal advantage or advantage for a third party is given, offered, promised, authorised or granted to a public official<sup>4</sup> in connection with an official act, this constitutes bribery in office. In addition to the consequences described in the previous paragraph, companies on whose behalf a person is offering bribes can also be prohibited from accepting or bidding for public contracts.</p> <p>1.5 The act of bribery also constitutes a criminal breach of trust if the person offering, promising, authorising or granting the bribe acts outside his or her authority to dispose off the company's assets or spend company's funds and thereby harms the company.</p>	<p><i>itu. Satu pelanggaran dapat dikenakan hukum dari beberapa yurisdiksi. Hukuman kepada pelaku dapat meliputi denda, hukuman penjara hingga beberapa tahun, pencabutan hak-hak tertentu, dan penyitaan harta benda; perusahaan atas nama orang yang menawarkan, menjanjikan, memberikan ijin atau memberikan suap dapat dikenakan denda pidana atau administratif, penyitaan hasil yang diperoleh secara ilegal atau dapat menghadapi konsekuensi administratif.</i></p> <p>1.4. <i>Jika keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak ketiga diberikan, ditawarkan, dijanjikan, diijinkan atau diberikan kepada pejabat pemerintah<sup>5</sup> sehubungan dengan suatu tindakan resmi, ini merupakan tindakan penyuapan di kantor. Selain konsekuensi-konsekuensi hukum sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, perusahaan dari orang yang menawarkan suap juga dilarang menerima atau ikut dalam tender kontrak publik.</i></p> <p>1.5. <i>Tindakan pidana penyuapan juga merupakan pelanggaran pidana terhadap kepercayaan jika orang yang menawarkan, menjanjikan, memberikan ijin atau memberikan suap bertindak di luar kapasitasnya untuk melepaskan aset perusahaan atau menggunakan dana perusahaan dan dengan demikian merugikan perusahaan.</i></p>
<p><b>2 Gifts from suppliers, service providers or other business partners</b></p> <p>2.1 Companies of the HeidelbergCement Group are important customers for suppliers and service providers ("Suppliers"). At times, employees, in particular those with procurement responsibilities, may receive unethical and improper offers by Suppliers or other business partners. The following paragraphs in this section apply to all employees, in particular to those involved in a procurement process.</p>	<p><b>2. Pemberian dari pemasok, penyedia layanan atau mitra bisnis lainnya</b></p> <p>2.1. <i>Perusahaan-perusahaan HeidelbergCement Group adalah pelanggan penting bagi para pemasok dan penyedia layanan ("Pemasok"). Kebanyakan karyawan, khususnya mereka yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pengadaan, dapat mungkin menerima penawaran yang tidak etis dan tidak benar dari Pemasok atau mitra bisnis lainnya. Paragraf berikut berlaku untuk semua karyawan, khususnya untuk mereka yang terlibat dalam proses pengadaan.</i></p>

<sup>4</sup> Throughout this Guideline the term "public officials" refers to the OECD definition (OECD, 2006, Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprise): "These include people who hold a legislative, administrative or judicial office (either appointed or elected); any person exercising a public function, including for a public agency or a public enterprise (e.g. a state owned enterprise); any official or agent of a public international organisation."

<sup>5</sup> *Dalam Panduan ini istilah "pejabat publik" mengacu pada definisi OECD (OECD, 2006, Laporan Tahunan tentang Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional): "Ini termasuk orang-orang yang memegang jabatan legislatif, administratif atau yudikatif (baik yang ditunjuk atau dipilih); setiap orang yang menjalankan fungsi publik, termasuk untuk badan publik atau perusahaan publik (misalnya badan usaha milik negara); pejabat atau agen dari organisasi internasional publik."*

<p>2.2 Suppliers must be selected only on a competitive basis. Attempts by Suppliers to influence employees of the HeidelbergCement Group in their procurement decisions by means of any kind of gifts, benefits or gratuities are not tolerated, be it personal or for a third party. Suppliers must be advised not to attempt to influence HeidelbergCement Group company employees in this way and a warning must be given in the event of a violation. If the violation is serious or violations are repeated, a freeze on orders must be imposed. Suppliers who violate this rule seriously or repeatedly must be identified to Group Purchasing.</p>	<p>2.2. Pemasok harus dipilih hanya melalui proses persaingan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemasok untuk mempengaruhi karyawan HeidelbergCement Group dalam membuat keputusan pengadaan dengan cara memberikan hadiah, manfaat atau gratifikasi tidak dapat dibenarkan baik pribadi atau untuk pihak ketiga. Pemasok wajib diberitahu untuk tidak mencoba-coba mempengaruhi karyawan perusahaan HeidelbergCement Group dengan cara ini dan peringatan harus diberikan jika terjadi pelanggaran. Jika pelanggaran bersifat serius atau pelanggaran tersebut diulangi, maka harus dilakukan pembatalan pemesanan pengadaan. Pemasok yang melanggar aturan ini secara serius atau berulang kali harus diberitahukan datanya kepada Grup Pengadaan.</p>
<p>2.3 Except as listed below, employees of Group companies are prohibited, either directly or indirectly, from accepting gifts or any other unjustified benefit or thing of value including any type of gratifications (e.g. loans, commission, valuable security or other property or interest in property, employment, release from or discharge of any obligation or other liability, any other service, favour or advantage, etc.).</p>	<p>2.3. Kecuali sebagaimana tercantum di bawah ini, karyawan dari perusahaan Grup dilarang, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk menerima hadiah atau manfaat apapun yang tidak dibenarkan atau barang bernilai apapun termasuk jenis gratifikasi (misalnya pinjaman, komisi, jaminan berharga atau hak atas tanah, pekerjaan, atau pembebasan dari pelaksanaan kewajiban atau tanggung jawab lain, layanan lain apapun, dukungan atau keuntungan, dll).</p>
<p>Exceptions are gifts or hospitality where</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- they occur infrequently (once or twice per year per business partner),</li> <li>- they are of insignificant monetary value as defined below in section 2.4,</li> <li>- they arise only out of ordinary corporate hospitality and customary business practices,</li> <li>- their acceptance does not violate any laws or regulations, and</li> <li>- there is no reasonable possibility or potential inference that the decision to enter into a contract with the Supplier was influenced by the receipt of such gifts or hospitality.</li> </ul>	<p>Pengecualian hadiah atau keramahtamahan tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jarang terjadi (sekali atau dua kali per tahun per mitra bisnis),</li> <li>- nilainya tidak signifikan sebagaimana didefinisikan dalam bagian 2.4,</li> <li>- diberikan hanya dari keramahtamahan perusahaan yang lazim dan praktik bisnis yang normal,</li> <li>- menerimanya bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum atau peraturan, dan</li> <li>- tidak ada kemungkinan yang wajar atau kesimpulan bahwa keputusan untuk mengikatkan diri dalam kontrak dengan Pemasok dipengaruhi oleh penerimaan hadiah atau keramahtamahan tersebut.</li> </ul>
<p>Thus, the following gifts and invitations can generally be accepted, depending on the individual situation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promotional gifts (e.g. ballpoint pens, calendars, note pads, coffee mugs, shirts or other simple articles of clothing, etc.)</li> </ul>	<p>Dengan demikian, hadiah dan undangan berikut ini secara umum dapat diterima, tergantung pada situasi masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hadiah promosi (misalnya bolpen, kalender, buku catatan, cangkir kopi, kemeja atau barang-barang sederhana dari jenis pakaian,</li> </ul>

<p>and other gifts of insignificant monetary value in general, and</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- occasional invitations for business meals, as long as the invitation has a business purpose, (e.g. it takes place in the context of a business meeting) and the value of the business meal is appropriate to the invited person's position in the company.</li> </ul> <p>Explicitly prohibited are any acceptance of gifts, benefits, gratuities and invitations if there is any risk of their influencing the behaviour of the accepting employee in an improper way (e.g. if any relation between the acceptance of a gift, benefit, gratuity or invitation and placement of an order or contract conclusion could be construed).</p> <p>Special caution is required if invitations include the coverage of travel or accommodation expenses or the costs of an accompanying spouse or travel companion. It is principally prohibited to accept the coverage of such costs by a Supplier except for cases where it follows social or cultural obligations (e.g. invitation to a ball where accompaniment by a spouse/companion is required). Exceptions are subject to prior approval by the employee's supervisor.</p> <p>2.4 As a rule, "insignificant monetary value" means the value does not exceed the cost of an ordinary business meal. In exceptional cases and only with the documented approval of the relevant supervisor, gifts, gratuities, benefits or invitations beyond this limit can be considered to have insignificant monetary value. In any case, bear in mind that in most countries gifts, benefits, gratuities and invitations above a certain amount are considered to be taxable income; naturally, the relevant tax laws and regulations must be observed.</p> <p>2.5 Accepting money or equivalents (e.g. gift cards or gift certificates for specific stores) for personal use or for a third party is always prohibited. The employee must immediately report any such attempt to his or her supervisor. In the event of non-compliance by</p>	<p><i>dll) dan hadiah lain yang secara umum nilainya tidak signifikan, dan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>undangan sesekali untuk hadir pada jamuan bisnis, dengan ketentuan bahwa undangan tersebut memiliki tujuan bisnis, (misalnya terjadi dalam konteks rapat bisnis) dan nilai dari jamuan bisnis tersebut wajar untuk jabatan orang diundang dalam perusahaan.</i></li> </ul> <p><i>Larangan secara tegas diberlakukan untuk segala penerimaan hadiah, manfaat, gratifikasi dan undangan jika ada risiko hal tersebut akan mempengaruhi perilaku karyawan yang menerimanya dengan cara yang tidak tepat (misalnya jika dapat ditafsirkan ada hubungan antara penerimaan suatu hadiah, manfaat, gratifikasi atau undangan dengan pengajuan order atau kesepakatan kontrak).</i></p> <p><i>Perhatian khusus perlu diberikan jika undangan juga berisi biaya perjalanan atau akomodasi atau biaya untuk pasangan yang ikut atau teman seperjalanan. Sangat dilarang untuk menerima biaya-biaya tersebut yang diberikan oleh Pemasok kecuali untuk kasus-kasus di mana ada hubungan dengan kewajiban sosial atau budaya (misalnya undangan ke pertandingan sepak bola dimana wajib didampingi oleh pasangan/pendamping). Pengecualian tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari atasan karyawan.</i></p> <p>2.4. <i>Sebagai aturan, "nilai uang yang tidak signifikan" berarti nilai yang jumlahnya tidak melebihi biaya dari jamuan makan biasa. Dalam kasus-kasus luar biasa dan hanya atas persetujuan tertulis dari atasan yang terkait, hadiah, gratifikasi, manfaat atau undangan yang melampaui batas ini dapat dianggap memiliki nilai uang yang tidak signifikan. Dalam kasus apapun, ingatlah bahwa di sebagian besar negara hadiah, manfaat, gratifikasi dan undangan yang nilainya di atas jumlah tertentu dapat dikenakan pajak penghasilan; dengan demikian maka hukum dan peraturan pajak yang relevan harus dipatuhi.</i></p> <p>2.5. <i>Menerima uang atau yang setara (misalnya kartu hadiah atau kartu hadiah untuk toko-toko tertentu) untuk kepentingan pribadi atau untuk pihak ketiga juga dilarang. Karyawan harus segera melaporkan upaya tersebut kepada atasannya. Dalam hal atasan tidak juga patuh maka karyawan harus melaporkan ke tingkat</i></p>
--	---

<p>the immediate supervisor the employee shall report it to the next higher level or to the compliance hotline (SpeakUp).</p> <p>2.6 Occasional invitations (once or twice per year per business partner) for events such as sporting events, concerts, cultural events, trade fairs, or conferences may only be accepted under the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- there is a direct business purpose (but no direct relation with current contract negotiations),</li> <li>- that the employee is accompanied by the business relationship contact person, and</li> <li>- the value of the ticket is appropriate to the invited person's position in the company.</li> </ul> <p>The acceptance of such an invitation is subject to approval by the employee's supervisor. The coverage of travel or accommodation costs by the inviting company must normally be declined as well as the invitation of spouses/companions. Exceptions require explicit prior approval by the employee's supervisor.</p> <p>2.7 If a gift, benefit, gratuity or invitation may not be accepted because of these rules, the intended recipient shall politely decline it and refer to this Guideline. If a gift has already been delivered, it shall be returned. When this isn't possible either then the recipient needs to report it to his supervisor and request instructions what to do.</p>	<p><i>lebih tinggi atau ke hotline kepatuhan "SpeakUp".</i></p> <p>2.6. <i>Undangan sesekali (sekali atau dua kali per tahun per mitra bisnis) untuk acara-acara seperti acara olahraga, konser, acara kebudayaan, pameran dagang, atau konferensi hanya boleh diterima dengan syarat sebagai berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>ada tujuan bisnis langsung (tapi tidak ada hubungan langsung dengan negosiasi kontrak yang sedang berlangsung),</i></li> <li>- <i>karyawan tersebut didampingi oleh kontak hubungan bisnis, dan</i></li> <li>- <i>nilai tiket sesuai dengan jabatan orang yang diundang dalam perusahaan.</i></li> </ul> <p><i>Penerimaan undangan tersebut juga tunduk pada persetujuan atasan Karyawan. Pembayaran biaya perjalanan atau akomodasi oleh perusahaan yang mengundang biasanya akan ditolak demikian juga dengan undangan untuk pasangan/pendamping. Pengecualian dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari atasan karyawan.</i></p> <p>2.7. <i>Jika hadiah, manfaat, gratifikasi atau undangan tidak dapat diterima karena aturan-aturan ini, penerima yang bersangkutan wajib menolak dengan sopan dan mengacu pada Pedoman ini. Jika hadiah sudah diberikan maka hadiah tersebut wajib dikembalikan. Jika ini tidak memungkinkan pula, maka penerima perlu melaporkan kepada atasan dan memohon instruksi untuk bertindak.</i></p>
---	--



### 3 Gifts to employees of customers or other business partners

The HeidelbergCement Group expects that our customers or other business partners will not want their employees to be influenced in their purchasing decisions by personal gifts. For this reason, gifts, invitations, and other gratuities to employees of customers or other business partners must be limited so that such gifts are not likely to influence the customer's purchasing decision. Gratuities that go beyond promotional gifts and invitations to ordinary business meals are only permissible if the supervisor of the customer's/business partner's employee or competent body is informed and approves of the gift. In principle, the same rules apply for gifts to employees of customers as for the acceptance of gifts from suppliers and services providers as outlined in section **Error! Reference source not found..** Remember that providing money or equivalents is always prohibited and that it is not permitted to invite customers to adult entertainment venues.

These rules apply equally to the act of offering promising, authorising or granting gifts or invitations to persons with whom the customer's/business partner's employee is closely linked (e.g. a family member) or other third parties.

### 3. Pemberian kepada karyawan dari pelanggan atau mitra bisnis lainnya

*HeidelbergCement Group berharap agar pelanggan atau mitra bisnis kami yang lain tidak memperbolehkan karyawan mereka dipengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian atas dasar pemberian pribadi. Untuk alasan ini, maka hadiah, undangan, dan gratifikasi lainnya kepada karyawan pelanggan atau mitra bisnis lainnya harus dibatasi agar hadiah tersebut tidak dapat mempengaruhi keputusan pembelian yang diambil oleh divisi pengadaan. Gratifikasi yang jumlahnya melebihi hadiah promosi dan undangan jamuan makan biasa hanya diperbolehkan jika atasn karyawan mitra bisnis pelanggan/atau badan yang kompeten diberitahu dan menyetujuinya. Pada prinsipnya, aturan yang sama berlaku untuk pemberian kepada karyawan pelanggan seperti aturan yang berlaku untuk penerimaan pemberian dari pemasok dan penyedia jasa sebagaimana diuraikan dalam bagian 2. Ingat bahwa dilarang menyediakan uang atau sejenisnya dan tidak diperolehkan mengundang pelanggan ke tempat-tempat hiburan orang dewasa.*

*Aturan-aturan ini juga berlaku untuk tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan ijin atau memberikan pemberian atau undangan kepada orang-orang yang dekat dengan karyawan dari pelanggan/mitra bisnis (contoh: anggota keluarga) atau dengan pihak ketiga lainnya.*

**Unofficial Translation**

*pelanggan/mitra bisnis (contoh: anggota keluarga) atau dengan pihak ketiga lainnya.*

**4 Gifts to public officials**

4.1 The rules described in section 2 also apply to gifts, benefits, gratuities or invitations offered, promised, authorised or granted to public authorities and government officials for their personal benefit or the personal benefit of any related third party. In fact, some governmental agencies or departments have strict rules prohibiting all gifts, invitations, and other gratuities, even if of insignificant monetary value. Employees of HeidelbergCement Group companies are urged to be extremely careful and avoid any impression that a personal gift to a public official is intended to influence that individual in order to act or refrain from acting in any way in the performance of official duties. All employees are therefore prohibited from taking any action or measure that could give this impression. Thus, it is principally prohibited to give, offer, promise, authorise or grant, directly or indirectly, money or equivalents, or gifts, benefits or gratuities of any kind to public officials or to persons with whom the public official is closely linked (e.g. family members) or third parties. Any exceptions are subject to prior approval by the responsible company officer and the compliance officer of the respective country. Invitations for ordinary business meals for public officials require prior approval by the employee's supervisor. Snacks, coffee or other beverages during meetings as part of ordinary corporate hospitality are allowed if in compliance with the law and regulations.

4.2 This instruction may not be circumvented by giving, offering, promising, authorising or granting money or equivalents, or gifts, benefits or gratuities of any kind to persons, companies or institutions with which the public official is linked in any way whatsoever.

**4. Pemberian kepada Pejabat Pemerintah**

4.1. Aturan-aturan yang dijelaskan dalam bagian 2 juga berlaku untuk hadiah, manfaat, gratifikasi atau undangan yang ditawarkan, dijanjikan, diijinkan atau diberikan kepada pejabat publik dan pejabat pemerintah untuk pemakaian pribadi atau keuntungan pribadi dari pihak ketiga. Bahkan, beberapa lembaga atau departemen pemerintah memiliki aturan yang ketat yang melarang semua hadiah, undangan, dan gratifikasi lainnya meskipun nilainya tidak signifikan. Karyawan dari perusahaan-perusahaan dalam Grup HeidelbergCement sangat dianjurkan untuk berhati-hati dan menghindari kesan bahwa pemberian pribadi kepada perwakilan pemerintah dimaksudkan untuk mempengaruhi penerima dalam melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan dengan cara apapun dalam melaksanakan tugas-tugas resminya. Oleh karena itu semua karyawan dilarang melakukan tindakan atau kebijakan apapun yang dapat memberikan kesan ini. Oleh karena itu, pada prinsipnya dilarang untuk memberikan, menawarkan, menjanjikan, mengizinkan atau memberikan uang atau setara, atau hadiah, manfaat atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pejabat pemerintah atau kepada orang-orang yang dekat dengan pejabat pemerintah (contoh: anggota keluarga) atau dengan pihak ketiga lainnya. Setiap pengecualian dari ketentuan ini wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh pejabat perusahaan yang bertanggung jawab dan pejabat kepatuhan di masing-masing negara. Undangan jamuan makan bisnis untuk pejabat pemerintah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari atasan karyawan. Makanan ringan, kopi atau minuman lain selama pertemuan sebagai bagian dari keramahtamahan perusahaan diperbolehkan jika sesuai dengan hukum dan peraturan.

4.2. Petunjuk ini tidak dapat dihindari dengan memberikan, menawarkan, menjanjikan, memberi ijin atau memberikan uang atau yang setara, atau hadiah, manfaat atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada orang-orang, perusahaan atau lembaga dimana pejabat publik atau perwakilan pemerintah memiliki keterkaitan/hubungan dengan cara apapun juga.

<p>4.3 Payments or non-cash equivalents, invitations, gifts, gratuities or benefits of any kind with the purpose to secure or speed up any routine actions by government officials or private sector employees (also known as facilitation payments) are always prohibited.</p> <p>4.4 In particular, it is forbidden to give, directly or indirectly, any illicit advantage or favours to a public official performing inspections on the HeidelbergCement business offices, premises or plants in order to influence the inspector's opinions and decisions. The rules of this Guideline must be applied to every type of inspection/audit including, but not limited to tax, custom duties, technical, quality, health and safety, antitrust, environmental inspections and other types of inspections/audits carried out by public officials and/or private accredited entities acting for or on behalf of public bodies in order to grant licenses, permits, authorisations, concessions. At the end of the inspection an internal report must be prepared in order to document the transparency and traceability of the inspection.</p> <p>4.5 Political contributions to candidates for public office are only permitted if this is allowed under relevant law (whether international, national, state or local law) and the policy of the HeidelbergCement Group company making the contribution.</p>	<p>4.3. <i>Pembayaran atau setara non tunai, undangan, hadiah, gratifikasi atau manfaat apapun yang bertujuan untuk menjamin atau mempercepat tindakan rutin yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau karyawan swasta (juga disebut uang pelicin) senantiasa dilarang.</i></p> <p>4.4. <i>Secara khusus, dilarang untuk memberi, baik secara langsung atau tidak langsung, setiap keuntungan atau manfaat tersembunyi kepada seorang pejabat pemerintah yang sedang melakukan inspeksi di kantor bisnis, wilayah atau pabrik HeidelbergCement sehubungan untuk mempengaruhi opini dan keputusan petugas inspeksi. Aturan dalam Pedoman ini harus diaplikasikan untuk setiap jenis inspeksi/audit termasuk tapi tidak terbatas pada pajak, bea cukai, tehnik, kualitas, kesehatan dan keselamatan, anti-trust, inspeksi lingkungan, dan segala jenis inspeksi/audit lainnya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau entitas swasta yang terakreditasi yang bertindak untuk atau atas nama lembaga pemerintah untuk memberikan lisensi, izin, otorisasi, konsesi. Pada akhir inspeksi, laporan internal harus dipersiapkan untuk mendokumentasikan transparansi dan pelacakan inspeksi.</i></p> <p>4.5. <i>Kontribusi politik kepada calon pejabat publik hanya diizinkan jika hal ini diperbolehkan oleh hukum yang relevan (baik internasional, nasional, negara bagian atau hukum daerah) dan kebijakan perusahaan HeidelbergCement Group memberikan kontribusi.</i></p>
---	--

## 5 Conflicts of interest

A conflict of interest exists when an employee's private interest is in conflict with the interests of the Group in a given professional engagement. In all situations in which outside activities, personal or financial interests may conflict with those of the Group, all employees are expected to fully disclose them. No employee shall take part in any business activities of the Group where the employee may be influenced by personal relations that are, or may be, construed as a hindrance to objective decision taking.

Where possible employees must avoid personal interests that conflict with the employee's loyalty and responsibility owed to HeidelbergCement. All employees must discharge their responsibilities solely on the basis of what is in the best interest of the Group and independent of personal considerations or relationships. Employees are expected to adhere to both the letter and spirit of this policy and to disclose any relationship to their immediate supervisor that might give rise to conflicts of interest.

5.1 All employees are expected to maintain impartial relationships with customers and suppliers and only to act in the best interest of HeidelbergCement. In addition, they shall not have an interest in any supplier or customer. Disclosure shall be made to the responsible company officer if any employee or member of his family (employee's spouse, children or any other immediate family member) has or acquires, by gift, inheritance or otherwise, an interest in a supplier's or customer's business; this does not apply to ownership of less than 0.5 per cent of the stock of a publicly traded company.

5.2 No employee shall have an interest in companies whose products compete with any of the Group's product lines (i.e. cement, concrete, aggregates or other building materials). All employees are expected only to act in the best interest of the Group. Disclosure shall be made to the responsible company officer if any employee or member

## 5. Benturan Kepentingan

*Benturan kepentingan muncul ketika kepentingan pribadi karyawan bertentangan dengan kepentingan Grup dalam keterlibatan profesional tertentu. Dalam semua situasi dimana aktivitas di luar, maupun kepentingan pribadi atau keuangan dapat bertentangan dengan kepentingan Grup, semua karyawan diharapkan untuk mengungkapkannya. Tidak ada karyawan yang boleh mengambil bagian dalam aktivitas bisnis Grup dimana karyawan tersebut dapat dipengaruhi oleh hubungan pribadi yang atau dapat, ditafsirkan sebagai penghambat untuk pengambilan keputusan yang objektif.*

*Jika memungkinkan, karyawan harus menghindari kepentingan pribadi yang bertentangan dengan loyalitas dan tanggung jawab karyawan kepada HeidelbergCement. Semua karyawan harus menjalankan tanggung jawab mereka semata-mata atas dasar apa yang menjadi kepentingan terbaik Grup dan terlepas dari pertimbangan atau hubungan pribadi. Karyawan diharapkan untuk mematuhi baik isi maupun inti kebijakan ini dan untuk mengungkapkan hubungan apapun kepada atasan langsung mereka yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.*

5.1. Semua karyawan diharapkan menjaga hubungan yang tidak memihak dengan pelanggan dan pemasok dan hanya bertindak demi kepentingan terbaik HeidelbergCement. Selain itu, mereka tidak boleh memiliki kepentingan dengan pemasok atau pelanggan mana pun. Pengungkapan harus dilakukan kepada pejabat perusahaan yang bertanggung jawab jika ada karyawan atau anggota keluarganya (pasangan karyawan, anak-anak atau anggota keluarga dekat lainnya) memiliki atau memperoleh hadiah, harta atau yang lainnya, suatu kepentingan dalam bisnis pemasok atau pelanggan; ini tidak berlaku untuk kepemilikan kurang dari 0,5 persen saham dari perusahaan publik.

5.2. Tidak ada karyawan yang boleh memiliki kepentingan pada perusahaan yang produknya bersaing dengan lini produk Grup manapun (misalnya semen, beton, agregat, atau bahan bangunan lainnya). Semua karyawan diharapkan hanya bertindak demi kepentingan terbaik Grup. Pengungkapan harus dilakukan kepada pejabat perusahaan yang bertanggung

<p>of his family (employee's spouse, children or any other immediate family member) has or acquires, by gift, inheritance or otherwise an interest in a competing business; this does not apply to ownership of less than 0.5 per cent of the stock of a publicly traded company. In addition, employees shall not perform services of any kind for any competitor of the Group. Disclosure shall be made to the responsible company officer if an employee's spouse, children or any other immediate family member performs services for any competitor of HeidelbergCement.</p>	<p><i>jawab jika ada karyawan atau anggota keluarganya (pasangan karyawan, anak-anak atau anggota keluarga dekat lainnya) memiliki atau memperoleh, dengan hadiah, harta, atau kepentingan dalam bisnis yang bersaing; ini tidak berlaku untuk kepemilikan kurang dari 0,5 persen saham perusahaan publik. Selain itu, karyawan tidak boleh melakukan layanan apapun untuk pesaing Grup mana pun. Pengungkapan harus dilakukan kepada pejabat perusahaan yang bertanggung jawab jika pasangan karyawan, anak-anak, atau anggota keluarga dekat lainnya melakukan layanan untuk pesaing HeidelbergCement.</i></p>
<p><b>6 Corporate Citizenship activities</b></p> <p>As a leading global building materials company, HeidelbergCement recognises its social responsibilities and makes the strongest commitment in areas where it has the most expertise and can achieve the best impact for society. Thus, HeidelbergCement supports projects for public benefit, e.g. by means of sponsorships or donations, in the following areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- building, architecture, infrastructure;</li> <li>- environment, climate, biodiversity;</li> <li>- education, training, culture.</li> </ul> <p>However, such Corporate Citizenship activities can also be considered as a form of attempted influence (e.g. on permits, approvals), in particular in the course of an investment project (M&amp;A, brownfield, greenfield, etc.). To make sure that the perception of non-compliant behaviour in the context of investment projects does not arise, the following rules have to be observed:</p> <p>6.1 All applicable legal regulations on sponsorship and donations as well as internal company policies and guidelines must always be met - both in the country in which the resources are provided, as well as in the country in which they are used. In addition, such activities must be in line with the provisions of the Corporate Citizenship Policy and clearly serve the public interest.</p>	<p><b>6. Kegiatan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan</b></p> <p><i>Sebagai perusahaan internasional terkemuka dalam bidang bahan bangunan, HeidelbergCement menyadari tanggung jawab sosialnya dan memiliki komitmen paling tinggi di daerah dimana perusahaan memiliki keahlian yang paling baik dan dapat memberikan dampak yang terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian, HeidelbergCement mendukung proyek-proyek untuk kepentingan publik, misalnya melalui sponsorship atau amal, dalam bidang-bidang berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>bangunan, arsitektur, infrastruktur;</i></li> <li>- <i>lingkungan, iklim, keanekaragaman hayati,</i></li> <li>- <i>pendidikan, pelatihan, budaya.</i></li> </ul> <p><i>Namun, kegiatan-kegiatan Kemasyarakatan tersebut juga dapat dianggap sebagai bentuk upaya memberikan pengaruh (misalnya pada izin, persetujuan), khususnya dalam rangka suatu proyek investasi (M&amp;A, brownfield, greenfield, dll). Untuk memastikan tidak ada persepsi perilaku pelanggaran dalam konteks proyek investasi, aturan-aturan berikut ini wajib dipatuhi:</i></p> <p>6.1. Semua ketentuan hukum yang berlaku tentang sponsor dan amal maupun kebijakan dan pedoman internal perusahaan harus senantiasa dipenuhi - baik di negara dimana sumber daya diadakan, dan di negara dimana sumber daya tersebut digunakan. Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Kebijakan Kemasyarakatan Korporasi dan jelas-jelas untuk kepentingan publik.</p>

<p>6.2 It has to be ensured that no inappropriate competitive advantages for a HeidelbergCement Group company result from such Corporate Citizenship activities.</p> <p>6.3 Such activities must not bear any personal material advantages for public officials who are entrusted with permitting an investment by any HeidelbergCement Group company, or third parties being linked in any way whatsoever with these individuals.</p> <p>6.4 Such activities must not support individuals or profit-making projects.</p> <p>6.5 Activities conducted in cooperation with public officials have to be carried out in a politically neutral manner.</p> <p>6.6 All activities in the context of Corporate Citizenship engagement have to be conducted in full transparency, properly documented and approved by two persons, one of which has to be the responsible company officer of the respective country.</p>	<p>6.2. <i>Harus dipastikan bahwa tidak ada keunggulan kompetitif yang tidak pantas untuk perusahaan HeidelbergCement Group yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan Kemasyarakatan tersebut.</i></p> <p>6.3. <i>Kegiatan-kegiatan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan materi pribadi kepada pejabat pemerintah yang dipercayakan untuk memberikan ijin investasi oleh perusahaan HeidelbergCement Group, atau pihak ketiga yang terkait dengan cara apapun juga dengan orang-orang ini.</i></p> <p>6.4. <i>Kegiatan-kegiatan tersebut tidak boleh diadakan untuk mendukung individu-individu atau proyek yang bertujuan untuk mencari keuntungan.</i></p> <p>6.5. <i>Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan otoritas publik atau badan-badan pemerintah harus dilakukan dengan cara yang netral secara politik.</i></p> <p>6.6. <i>Semua kegiatan dalam konteks keterlibatan kegiatan Kemasyarakatan harus dilakukan secara transparansi, didokumentasikan dan disetujui oleh dua orang, salah satunya adalah pejabat perusahaan yang bertanggung jawab dari masing-masing negara.</i></p>
<p><b>7 Appointing agents and advisors</b></p> <p>7.1 Naturally, rules prohibiting bribery of, or improper gifts to, employees of business partners or public authorities may not be circumvented by appointing agents or advisors.</p> <p>7.2 Agent and advisor contracts are sometimes scrutinised by tax authorities and law enforcement agencies. Anyone who is unable to show a legitimate business purpose for an agent or advisor contract could be suspected of having entered into the agent or advisor contract for the purpose of circumventing the regulation prohibiting bribery. Furthermore, not performing a proper due diligence may be considered as negligent financing of bribery. To make sure that agent and advisor contracts have a legitimate business purpose, follow these steps:</p>	<p><b>7. Penunjukan Agen dan Konsultan</b></p> <p>7.1. <i>Pada dasarnya aturan-aturan yang melarang penyuapan, pemberian hadiah yang tepat kepada karyawan dari mitra bisnis atau otoritas publik tidak boleh dikecualian dengan menunjuk agen atau penasihat.</i></p> <p>7.2. <i>Kontrak dengan agen dan penasihat kadang-kadang diperiksa oleh otoritas pajak dan lembaga penegak hukum. Siapa saja yang tidak dapat menunjukkan adanya tujuan bisnis yang sah untuk perjanjian agen atau penasihat dapat dianggap mengadakan kontrak penunjukan agen atau penasihat untuk tujuan menghindari peraturan yang melarang penyuapan. Selain itu, tidak melakukan uji kelayakan dapat dianggap sebagai pembiayaan penyuapan yang disengaja. Untuk memastikan bahwa kontrak agen dan penasihat memiliki tujuan bisnis yang sah, ikuti langkah-langkah berikut:</i></p>

<p>7.2.1 As in all other business transactions, the identity of the parties must be clear. This includes persons acting on behalf of a corporation, partnership, or other legal entity. For new business partners in jurisdictions under which no contracts were concluded in the past and in case of doubt, natural persons should be asked to submit identification and corporations or other legal entities should provide official confirmation of their existence (business register extract, good standing certificate, etc.).</p> <p>7.2.2 The contractual partner must be identified in the contract with his or her name, business address, and, if applicable, the names of the persons acting on the contractual partner's behalf, as well as bank accounts which will be used to receive payments.</p> <p>7.2.3 Where possible, contracts should not be entered into with companies from offshore tax havens ("offshore companies"). If a contract with such an offshore company is unavoidable, make sure the owner or owners of this company are identified and retain this documentation separate from the contract. Special caution is to be paid in case of contracts with letterbox companies.</p> <p>7.2.4 The HeidelbergCement Group company directly benefitting from the agent or advisory service will normally be a party to the contract. If this is not possible because of unusual circumstances, the rights and obligations arising from the contract must be transferred to the company that benefits from the contract and the fee must be charged to this company.</p> <p>7.2.5 The agent or advisory service must be described in specific terms. If compensation is due on the successful completion of a transaction, the contract must contain clear language defining what it means to complete a transaction. This may be defined as the</p>	<p>7.2.1 <i>Sebagaimana dalam semua transaksi bisnis lainnya, identitas para pihak harus jelas. Ini termasuk orang-orang yang bertindak atas nama perusahaan, kemitraan, atau badan hukum lainnya. Untuk mitra bisnis baru di yurisdiksi di mana ada kontrak belum pernah dibuat dan dalam hal terdapat keraguan, orang yang bersangkutan harus diminta untuk menyerahkan identitas dan perusahaan atau badan hukum lainnya harus memberikan konfirmasi resmi tentang keberadaan mereka (kutipan dari tanda daftar perusahaan, sertifikat yang masih berlaku, dll).</i></p> <p>7.2.2 <i>Mitra kontraktual harus diidentifikasi dalam kontrak terkait nama, alamat usaha, dan jika berlaku, nama-nama orang yang bertindak atas nama mitra kontrak tersebut, serta rekening bank yang akan digunakan untuk menerima pembayaran.</i></p> <p>7.2.3 <i>Bila memungkinkan, kontrak tidak boleh diadakan dengan perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara bebas pajak ("perusahaan luar negeri"). Jika kontrak dengan perusahaan tersebut tidak dapat dihindari, pastikan pemilik atau para pemilik perusahaan tersebut diidentifikasi dan simpan dokumentasi tersebut terpisah dari kontrak. Perhatian khusus harus diberikan dalam hal kontrak diadakan dengan perusahaan letterbox (yaitu perusahaan yang didirikan di suatu negara semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak).</i></p> <p>7.2.4 <i>Perusahaan-perusahaan HeidelbergCement Group yang secara langsung memperoleh manfaat dari agen atau layanan konsultasi biasanya akan mengikatkan diri dalam kontrak. Jika kontrak tidak mungkin dibuat karena kondisi luar biasa, maka hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak harus dialihkan kepada perusahaan yang menerima manfaat dari kontrak dan biayanya dibebankan pada perusahaan ini.</i></p> <p>7.2.5 <i>Agen atau jasa Konsultan harus dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan khusus. Jika kompensasi wajib dibayar setelah transaksi berhasil dilakukan, kontrak harus menetapkan definisi yang jelas tentang arti menyelesaikan transaksi. Ini dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kontrak</i></p>
---	--



<p>execution of a contract by all parties, or different benchmarks may be used.</p> <p>7.2.6 If an advisor is to provide consulting services, there must be an indication of whether, by what means (oral/written?, in how much detail?, evidence?), and at what intervals reporting is required. The reporting duty of the advisor or consultant must be monitored. If no written reporting duty is required of the advisor or consultant, then the employee must maintain evidence of oral reports, telephone conversations, meetings, etc.</p> <p>7.2.7 The duration or term of the contract must be clearly stated, as well as any options to renew or extend the contract.</p> <p>7.2.8 The fee must be commensurate with the agent or advisory services due.</p> <p>7.2.9 The contract must contain clauses in which the agent or advisor expressly agrees to observe all existing laws in connection with the contract, including tax, anticorruption, trade sanctions and competition or antitrust laws. Any breach of these clauses by the agent or advisor shall be regarded as a material breach of the contract and shall entitle the HeidelbergCement Group company to terminate the contract immediately.</p> <p>7.2.10 The relevant legal department must be involved at a sufficiently early stage so that it can provide constructive legal advice and monitor compliance with HeidelbergCement Group policies and guidelines.</p> <p>7.2.11 Except in rare circumstances, public officials, and politicians should not be parties to agent or advisor contracts. If, however, such a contract is considered, careful attention must be paid in order to ensure that the contract does not require a particular vote or regulatory decision in which the HeidelbergCement Group company has an interest.</p>	<p>oleh semua pihak, atau dapat digunakan indikator-indikator lainnya.</p> <p>7.2.6 Jika penasihat akan memberikan jasa konsultasi, maka harus ada indikasi, dengan cara apa (lisan/tertulis?, berapa banyak detail?, Bukti?), dan berapa kali pelaporan harus diberikan. Tugas pelaporan penasihat atau konsultan harus dipantau. Jika tugas pelaporan tertulis dari penasihat atau konsultan tidak disyaratkan, maka karyawan wajib mengadakan bukti dari laporan-laporan lisan, percakapan via telepon, rapat-rapat, dll.</p> <p>7.2.7 Durasi atau jangka waktu kontrak harus dinyatakan dengan jelas, serta opsi untuk memperbaharui atau memperpanjang kontrak.</p> <p>7.2.8 Biaya harus sepadan dengan jasa agen atau jasa konsultasi yang diberikan.</p> <p>7.2.9 Kontrak harus berisi klausul di mana agen atau penasihat secara tegas setuju untuk mematuhi semua hukum yang berlaku sehubungan dengan kontrak, termasuk hukum tentang pajak, anti korupsi, sanksi dagang dan persaingan atau undang-undang antitrust. Setiap pelanggaran terhadap pasal-pasal ini oleh agen atau penasihat dianggap sebagai pelanggaran material terhadap kontrak dan memberikan hak kepada perusahaan HeidelbergCement Group untuk mengakhiri kontrak seketika.</p> <p>7.2.10 Departemen hukum yang relevan harus dilibatkan secara memadai selama tahap awal sehingga dapat memberikan nasihat hukum yang konstruktif dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan pedoman HeidelbergCement Group.</p> <p>7.2.11 Kecuali dalam kondisi yang jarang terjadi, pejabat pemerintah dan politisi tidak boleh terlibat sebagai pihak dari kontrak yang diadakan dengan agen atau penasihat. Namun, jika ternyata suatu kontrak dianggap melibatkan mereka, maka perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa kontrak tidak memerlukan persetujuan tertentu atau keputusan dari badan pengawas di mana perusahaan HeidelbergCement Group memiliki kepentingan.</p>
---	--

<b>8 Mergers and acquisitions</b>	<b>8. Penggabungan dan Pengambilalihan</b>
<p>8.1 As a successor entity, HeidelbergCement may be held liable for past violations of anticorruption laws committed by any company merged or acquired: thus, the consequences may be relevant for the Group, the company and individuals involved, both in terms of reputations and legal prosecution. HeidelbergCement is therefore committed to avoiding the risk of acquiring controlling interest in a third company with potential exposure to corruption or characterised by ineffective anticorruption compliance practices.</p>	<p>8.1. Sebagai entitas penerus, HeidelbergCement dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum antikorupsi di masa lalu yang dilakukan oleh perusahaan manapun yang digabungkan atau diakuisisi: dengan demikian, konsekuensinya mungkin relevan bagi Grup, Perusahaan, dan individu yang terlibat, baik dalam hal reputasi dan tuntutan hukum. Oleh karena itu, HeidelbergCement berkomitmen untuk menghindari risiko dari memperoleh kontrol kepentingan pada pihak ketiga yang berpotensi terindikasi melakukan tindak korupsi atau digolongkan sebagai terjadinya ketidakefektifan pemenuhan kepatuhan anti korupsi.</p>
<p>8.2 When HeidelbergCement is involved in merger and acquisition projects it is recommended to review, as part of the due diligence process, the activities of the target company in order to reasonably determine that it will not become involved in past, present and future corruption activities. In addition, specific representations and warranties and where applicable the appropriate indemnities should be inserted in the relevant agreements.</p>	<p>8.2. Ketika HeidelbergCement terlibat dalam proyek merger dan akuisisi, maka direkomendasikan untuk melakukan peninjauan, sebagai bagian dari proses uji kelayakan, aktivitas-aktivitas dari perusahaan yang dituju dalam rangka menetapkan secara layak/masuk akal bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam aktivitas korupsi masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Sebagai tambahan, jaminan dan gambaran spesifik dan di tempat yang berlaku, ganti rugi yang tepat harus dicantumkan dalam perjanjian yang relevan.</p>
<p>8.3 In the performance of the due diligence activity, it is recommended to pay attention to the following types of information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the percentage of the target company's business derived from government contracts;</li> <li>- the types and identities of the intermediaries that the target company uses and their compensation;</li> <li>- the involvement of public officials in the target company's business (as owner, directors, employees or their relatives)</li> <li>- the compliance of the target company's internal controls, books and records with the applicable laws and international standards;</li> <li>- whether the target company has ever been accused of violating anticorruption laws, requiring it to disclose any prior relevant issues including incidents of bribery, corruption or criminal allegations.</li> </ul>	<p>8.3. Dalam pelaksanaan aktivitas uji kelayakan, bahwa direkomendasikan untuk memperhatikan jenis-jenis informasi berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persentase dari sasaran bisnis perusahaan yang berasal dari kontrak pemerintah;</li> <li>- jenis dan identitas para perantara yang digunakan perusahaan sasaran dan kompensasinya;</li> <li>- keterlibatan pejabat pemerintah dalam sasaran bisnis perusahaan (sebagai pemilik, direktur, karyawan atau keluarganya);</li> <li>- kepatuhan akan kontrol internal perusahaan sasaran, buku-buku dan catatan dengan peraturan yang berlaku dan standar internasional;</li> <li>- apakah perusahaan sasaran pernah menjadi terdakwa atas pelanggaran peraturan anti korupsi, yang menuntut untuk mengungkap segala isu terkait sebelumnya termasuk peristiwa penyyuapan, korupsi atau kriminal lainnya.</li> </ul>

<p><b>9 Training</b></p> <p>9.1 All employees whose work involves the potential for corrupt behaviour must receive training based on the obligations set out within this Guideline.</p> <p>9.2 The supervisor of an employee will provide the initial training for that employee when the supervisor familiarises the employee with his or her duties. This initial training must be thorough and this Guideline shared in printed or electronic format. For follow-up training, internal or external training programmes should be used, as well as regular internal specialist meetings (purchaser, sales, HTC, CCM, regular department meetings, etc.) and, if available, e-c@mpus and web-based training.</p> <p>9.3 The initial and follow-up training must be documented. Employees must receive anti-corruption training at least once every two years.</p>	<p><b>9. Pelatihan</b></p> <p>9.1. <i>Semua karyawan yang pekerjaannya memiliki potensi tindak pidana korupsi harus menerima pelatihan berdasarkan kewajiban yang diatur dalam Pedoman ini.</i></p> <p>9.2. <i>Atasan karyawan akan memberikan pelatihan awal kepada karyawan tersebut selama atasan memberikan pengenalan tentang tugas-tugas karyawan. Pelatihan awal ini harus dilakukan secara menyeluruh dan Pedoman ini harus diberikan dalam bentuk cetak maupun elektronik. Untuk tindak lanjut pelatihan, akan dilakukan program pelatihan internal maupun eksternal, serta pertemuan rutin khusus secara internal (rapat rutin departemen pembelian, penjualan, HTC, CCM, dll.) dan, jika ada, pelatihan e-c@MPUs dan pelatihan berbasis web.</i></p> <p>9.3. <i>Pelatihan awal dan pelatihan lanjutan harus didokumentasikan. Karyawan harus menerima pelatihan anti korupsi sekurang-kurangnya sekali setiap dua tahun.</i></p>
--	---

<p><b>10 Personnel rotation, two-person integrity, documentation</b></p> <p>10.1 In addition to proper hiring practices and appropriate training, HeidelbergCement Group companies should take other steps to reduce the risk of corrupt behaviour.</p> <p>10.2 One way to reduce the risk of corruption is to regularly change or rotate personnel assignments which are particularly exposed to corruption such as the purchasing function. Such changes reduce the risk that an employee will be exposed to advantages or gifts, be it personal or for a third party, from business partners or become too close to business partners and thereby lose the critical distance necessary to represent the interests of the HeidelbergCement Group.</p> <p>10.3 Employees are urged to apply the two-person integrity principle in all business transactions of significant value. Not only does this make business sense for the company because two people will always see and perceive more than a single person, but it forms an effective control against conscious or unconscious misconduct in procurement and supply activities.</p> <p>10.4 The two-person integrity principle also applies to the separation of operational and monitoring functions. For example, the checking and allocation of an invoice may not be performed by the same person who made the decision to place the order. Only very low value orders are exceptions to this rule.</p> <p>10.5 Every business transaction that leads to payments or deliveries must be documented following best business practices and included in the company's accounting records. The documentation and accounting entries must accurately represent the actual situation. If documents or accounting entries are not produced or do not accurately represent the actual situation, this discrepancy must be investigated.</p>	<p><b>10. Rotasi Personil, integritas dua orang, dokumentasi</b></p> <p>10.1. <i>Selain praktik perekrutan dan pelatihan yang tepat, perusahaan-perusahaan dalam Grup HeidelbergCement juga wajib melakukan langkah-langkah lain untuk mengurangi risiko perilaku tindak pidana korupsi.</i></p> <p>10.2. <i>Salah satu cara untuk mengurangi risiko korupsi adalah melakukan pergantian dan rotasi personil secara teratur kepada karyawan yang secara khusus berpotensi melakukan tindak pidana korupsi seperti departemen pembelian. Perubahan tersebut akan mengurangi risiko karyawan memperoleh keuntungan atau mendapatkan pemberian baik untuk pribadi atau untuk pihak ketiga dari mitra bisnis atau tidak terlalu dekat dengan mitra bisnis dan dengan demikian akan kehilangan jarak kritis yang diperlukan untuk mewakili kepentingan HeidelbergCement Group.</i></p> <p>10.3. <i>Karyawan didesak untuk menerapkan prinsip integritas dua orang di semua transaksi bisnis yang memiliki nilai yang signifikan. Hal ini tidak hanya wajar secara bisnis bagi perusahaan karena dua orang akan selalu melihat dan mengawasi dengan lebih baik dibandingkan satu orang, tetapi juga akan membentuk suatu kontrol yang efektif terhadap kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam kegiatan-kegiatan pengadaan dan pasokan.</i></p> <p>10.4. <i>Prinsip integritas dua orang juga berlaku untuk pemisahan fungsi-fungsi operasional dan fungsi pengawasan. Sebagai contoh, pemeriksaan dan alokasi tagihan tidak dapat dilakukan oleh orang yang sama yang telah membuat keputusan untuk mengajukan order. Hanya order dengan nilai yang sangat rendah dapat boleh dikecualikan dalam aturan ini.</i></p> <p>10.5. <i>Setiap transaksi bisnis yang mengarah pada pembayaran atau penyerahan harus didokumentasikan sesuai praktek-praktek bisnis terbaik dan dimasukkan dalam catatan akuntansi perusahaan. Dokumentasi dan catatan akuntansi harus secara akurat mewakili situasi yang nyata. Jika dokumen atau catatan akuntansi tidak dibuat atau tidak secara akurat mewakili situasi yang aktual, maka penyimpangan ini harus diselidiki.</i></p>
--	--

<p><b>11 Compliance, SpeakUp hotline, questions</b></p> <p>Practices that do not comply with this Guideline should be promptly reported to a supervisor (or supervisor's superior), compliance officer, company attorney, head of other appropriate department/unit, or to the <b>SpeakUp</b> compliance hotline (<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement/">www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement/</a>). Business partners are also free to contact SpeakUp if they think a HeidelbergCement Group employee has not acted appropriately.</p> <p>11.1 Questions about this Guideline should be directed to a supervisor, compliance officer, or company attorney.</p>	<p><b>11. Kepatuhan, hotline SpeakUp, pertanyaan</b></p> <p><i>Praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Pedoman ini harus segera dilaporkan kepada atasan (atau atasan supervisor), pejabat kepatuhan, pengacara perusahaan, kepala departemen /unit lain yang sesuai, atau ke hotline kepatuhan <b>SpeakUp</b> (<a href="http://www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement/">www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement/</a>). Mitra Bisnis juga dapat menghubungi SpeakUp jika mereka mendapati ada karyawan HeidelbergCement Group yang tidak bertindak dengan tepat.</i></p> <p>11.1. <i>Pertanyaan-pertanyaan mengenai Pedoman ini harap diajukan kepada atasan, pejabat kepatuhan, atau pengacara perusahaan.</i></p>
<p><b>12 Contact and further information</b></p> <p><b>Roland Sterr</b>          Director Group Legal &amp; Compliance          Phone: +49 6221 481-13663          Fax: +49 6221 481 13705          Email: <a href="mailto:roland.sterr@heidelbergcement.com">roland.sterr@heidelbergcement.com</a></p> <p>or your local/Country Compliance Officer/Legal Counsel</p>	<p><b>12. Kontak dan informasi lebih lanjut</b></p> <p><b>Roland Sterr</b>          Director Group Legal &amp; Compliance          Phone: +49 6221 481-13663          Fax: +49 6221 481 13705          Email: <a href="mailto:roland.sterr@heidelbergcement.com">roland.sterr@heidelbergcement.com</a></p> <p>Atau dapat menghubungi Compliance Officer/Legal Counsel anda.</p>